



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENY SURYANI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. NHK : 400559

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.005.616.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/100 m2 di KOTA SEMARANG ,
WARISAN Rp. 420.780.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/84 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 195.842.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp.
85.960.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/60 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 106.034.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp.
98.500.000
6. Tanah Seluas 250 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp.
98.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 202.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIRION Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
3. MOTOR, HONDA KARISMA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



23.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.500.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.222.248
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.296.338.248
III. HUTANG	Rp.	175.288.135
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.121.050.113

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.